

TESIS
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PEMULIHAN
EKOSISTEM PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
HASIL PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN HUTAN DI
KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN



Diajukan oleh:
M. ARIFUDDIN
NIM 2420215310113

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PEMULIHAN
EKOSISTEM PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
HASIL PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN HUTAN DI
KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN**

**TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

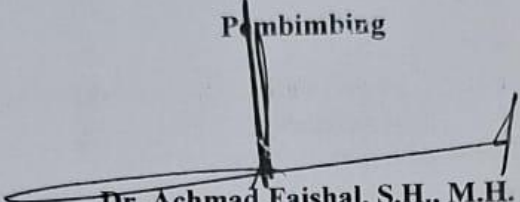
**Diajukan oleh:
M. ARIFUDDIN
NIM 2420215310113**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul : Tanggung Jawab Hukum Atas Pemulihan Ekosistem Pada Areal
Perkebunan Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Kembali Kawasan
Hutan Di Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Selatan
Nama : M. Arifuddin
NIM : 2420215310113

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing

Pembimbing


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 197506152003121001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



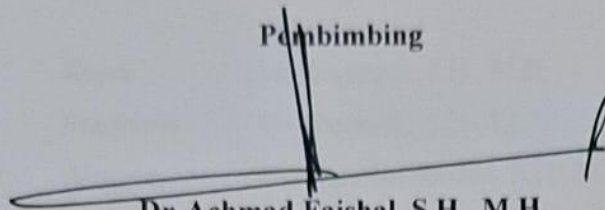
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal**

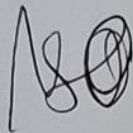
Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP 197805022001122002

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Anggota: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. (Pembimbing)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ARIFUDDIN

NIM : 2420215310113

Program Studi : Magister Hukum

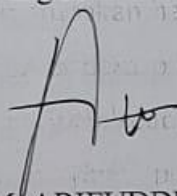
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 28 September 2026

Yang membuat pernyataan,



M. ARIFUDDIN

NIM. 2420215310113

M. ARIFUDDIN. 2026. TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PEMULIHAN EKOSISTEM PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT HASIL PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. [JUMLAH] halaman.

RINGKASAN

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 telah melakukan penguasaan kembali atas jutaan hektare kawasan hutan, dan sebagian besar di antaranya diserahkan kepada badan usaha milik negara untuk dikelola secara komersial. Di Kalimantan Tengah, 127 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 849.988 hektare menjadi sasaran penertiban tersebut, dan sebagian besar areal itu berdiri di atas ekosistem gambut yang telah lama dikeringkan melalui jaringan kanal drainase. Di Kalimantan Selatan, sekitar 17.000 hektare areal perkebunan kelapa sawit tanpa perizinan di tiga cagar alam Kabupaten Kotabaru dikuasai kembali pada 18 Juni 2025. Peralihan penguasaan tidak mengubah kondisi fisik lahan. Kanal tetap terbuka, muka air tanah tetap rendah, tegakan mangrove tetap hilang, dan kerawanan kebakaran tetap ada. Yang berubah hanya pihak yang menguasai.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum atas pemulihan ekosistem pada areal perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menurut hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana konstruksi hukum tanggung jawab pemulihan ekosistem pada peralihan penguasaan areal tersebut yang menjamin bekerjanya asas pencemar membayar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal research dan bersifat preskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terhadap hukum Amerika Serikat dan hukum Jerman. Kedua lokus dipilih secara bertujuan untuk memperoleh variasi pada status kawasan hutan, yaitu kawasan yang dapat dilepaskan di Kalimantan Tengah dan kawasan suaka alam yang tidak dapat dilepaskan di Kalimantan Selatan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kegagalan norma atas areal tersebut muncul dalam dua bentuk yang berbeda menurut status kawasan. Di Kalimantan Tengah, ketentuan perlindungan ekosistem gambut menuntut pemulihan fungsi hidrologis melalui pembasahan kembali, sedangkan kebijakan penertiban kawasan hutan mengarahkan pelepasan kawasan agar budi daya kelapa sawit dapat dilanjutkan, dan kelanjutan itu menuntut dipertahankannya drainase. Pertentangan arah tersebut terbukti melalui uji kesamaan objek, uji isi perintah, dan uji keserentakan, dengan kedalaman muka air tanah sebagai variabel yang dipersengketakan. Di Kalimantan Selatan, tempat areal berada pada cagar alam yang tidak dapat dilepaskan, arah perintah hukum bersifat tunggal dan kegagalan itu berbentuk ketiadaan subjek yang wajib melaksanakannya. Keduanya berpangkal pada cacat yang sama, yaitu terikatnya kewajiban pemulihan pada figur penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang keberadaannya berhenti pada saat penguasaan diambil alih. Keadaan itu tidak dapat diselesaikan melalui asas preferensi, karena asas *lex superior* hanya bekerja terbatas dan tidak menjawab persoalan subjek, asas *lex specialis* tidak dapat bekerja karena kedua perangkat sama-sama khusus dalam ranahnya masing-masing, dan asas *lex posterior* tidak dapat bekerja karena kedua norma tidak mengatur hal yang sama. Yang tersisa adalah ketiadaan norma yang menentukan kedudukan kewajiban pemulihan pada saat penguasaan berpindah, diperberat oleh frasa dari usaha dan/atau kegiatannya dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang memutus rantai tanggung jawab tepat pada titik peralihan.

Kedua, konstruksi hukum yang diusulkan terdiri atas empat unsur yang harus dirumuskan pada tingkatan undang-undang, yaitu kewajiban uji tuntas lingkungan sebelum peralihan penguasaan sebagai penetapan garis dasar, tanggung jawab residual mantan pemegang perizinan berusaha yang tidak hapus karena berpindahnya penguasaan maupun karena telah dibayarkannya denda administratif, tanggung jawab penguasa baru atas kerusakan yang timbul setelah peralihan beserta kewajiban pengendalian risiko dengan pembebanan lapis kedua yang dibatasi sebesar nilai ekonomi areal, serta jaminan pembiayaan pemulihan melalui dana yang terpisah. Konstruksi tersebut dibangun di atas perbedaan

antara tanggung jawab yang melekat pada perbuatan dan tanggung jawab yang melekat pada keadaan lahan, dengan memanfaatkan pelajaran dari Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act di Amerika Serikat, Bundes-Bodenschutzgesetz beserta pembatasan proporsionalnya di Jerman, dan mekanisme jaminan reklamasi dalam hukum pertambangan Indonesia. Konstruksi itu diuji terhadap kedua keadaan tersebut dan bekerja pada keduanya, karena ia memindahkan titik lekat kewajiban pemulihan dari figur penanggung jawab kegiatan kepada keadaan areal beserta urutan pihak yang menguasainya.

M. ARIFUDDIN. 2026. **Tanggung Jawab Hukum atas Pemulihan Ekosistem pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. [JUMLAH] halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemulihan Ekosistem, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan, Asas Pencemar Membayar, Tanggung Jawab atas Keadaan Lahan

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum atas pemulihan ekosistem pada areal perkebunan kelapa sawit hasil penguasaan kembali kawasan hutan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan; kedua, untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum tanggung jawab pemulihan ekosistem pada peralihan penguasaan areal tersebut yang menjamin bekerjanya asas pencemar membayar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe doctrinal research dan bersifat preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kegagalan norma pada areal hasil penguasaan kembali muncul dalam dua bentuk, yaitu pertentangan arah antara ketentuan perlindungan ekosistem gambut dan kebijakan penertiban kawasan hutan di Kalimantan Tengah, serta ketiadaan subjek yang wajib memulihkan pada cagar alam yang tidak dapat dilepaskan di Kalimantan Selatan, dan keduanya tidak dapat diselesaikan melalui asas preferensi karena yang tersisa adalah ketiadaan norma mengenai kedudukan kewajiban pemulihan pada saat penguasaan berpindah. Kedua, konstruksi hukum yang menjamin bekerjanya asas pencemar membayar terdiri atas kewajiban uji tuntas lingkungan sebelum peralihan, tanggung jawab residual mantan pemegang perizinan berusaha,

tanggung jawab penguasa baru beserta kewajiban pengendalian risiko dengan pembebanan lapis kedua yang terbatas, dan jaminan pembiayaan pemulihan melalui dana yang terpisah, yang seluruhnya harus dirumuskan pada tingkatan undang-undang.

M. ARIFUDDIN. 2026. *Legal Responsibility for Ecosystem Restoration in Oil Palm Plantation Areas Resulting from the State Repossession of Forest Areas in Central and South Kalimantan*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.. [JUMLAH] pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Responsibility, Ecosystem Restoration, State Repossession of Forest Areas, Polluter Pays Principle, Condition-Based Liability

The objectives of this study are, first, to identify and analyse the regulation of legal responsibility for ecosystem restoration in oil palm plantation areas resulting from the state repossession of forest areas in Central and South Kalimantan; and second, to identify and analyse the legal construction of that responsibility upon the transfer of control over such areas in a way that gives effect to the polluter pays principle.

This study uses a normative legal research method with a doctrinal research type and is analytically prescriptive. The approaches employed are statutory, conceptual, and comparative. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through literature review and then analysed qualitatively.

The results indicate that, first, the failure of norms in repossessed areas appears in two distinct configurations. In Central Kalimantan, where the areas lie in forest zones that may lawfully be released, the peat protection rules require rewetting while the forest enforcement policy directs the continuation of cultivation, producing a conflict of direction. In South Kalimantan, where the areas lie in strict nature reserves that may not be released, the legal command is single but no norm identifies the party bound to carry it out, producing an absence of subject. Both stem from the same defect, namely that the restoration obligation is attached to the figure of the person responsible for the business or activity, a figure that ceases to exist once control is taken over. Neither configuration can be resolved through the principles of preference, because what remains is the absence of any norm determining the status of the restoration obligation at the moment

control is transferred. Second, the legal construction that gives effect to the polluter pays principle consists of a mandatory environmental due diligence prior to transfer, the residual liability of the former permit holder, the liability of the new controller together with a risk control obligation and a limited second-tier burden, and a guaranteed restoration fund, all of which must be enacted at the level of statute.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PEMULIHAN EKOSISTEM PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT HASIL PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN”. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan tesis ini penulis mendapatkan banyak bantuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Suprpto, S.H., M.H., Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku ketua, sekretaris, dan anggota panitia pengujian tesis yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini.

5. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bagian Akademik dan seluruh staf Program Magister Hukum serta Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan.

Banjarmasin, 28 September 2026

M. ARIFUDDIN
NIM. 2420215310113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR PERTAMA	iii
HALAMAN PENGESAHAN LEMBAR KEDUA	iv
SUSUNAN TIM PENGUJI	v
SERTIFIKAT PLAGIASI	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN Error! Bookmark not defined.

A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.1
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.2
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.5
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.7
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan	42

BAB II PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN
EKOSISTEM GAMBUT PADA AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
HASIL PENGUASAAN KEMBALI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN
TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN 44

- A. Kedudukan Hukum Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Atas Ekosistem
Gambut dan Kawasan Suaka Alam Hasil Pengusahaan Kembali 44
- B. Pertentangan Norma antara Kewajiban Pemulihan Ekosistem dan Arah
Pemanfaatan Areal Hasil Pengusahaan Kembali..... 61
- C. Kekaburan Subjek Penanggung Jawab Pemulihan pada Peralihan
Penguasaan Areal 76

BAB III KONSTRUKSI HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN
EKOSISTEM GAMBUT YANG MENJAMIN BEKERJANYA ASAS
PENCEMAR MEMBAYAR 92

- A. Asas Pencemar Membayar dan Tanggung Jawab Berdasarkan
Keadaan Lahan sebagai Dasar Konstruksi Hukum..... 92
- B. Pengaturan Tanggung Jawab Pemulihan Lahan Terkontaminasi dalam
Hukum Amerika Serikat dan Hukum Jerman**Error! Bookmark not defined.**05
- C. Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Pemulihan Ekosistem yang
Diusulkan dan Pengujiannya.....**Error! Bookmark not defined.**21

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**42

- A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**42
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**43

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Model Pembebanan Tanggung Jawab Pemulihan
pada Peralihan Penguasaan Lahan

